

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena sebagai sumber daya manusia, kemampuan perempuan yang berkualitas sangat diperlukan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan kunci bagi produktivitas nasional dan bagi penguatan daya saing bangsa di bidang ekonomi maupun sosial di era globalisasi yang semakin kompetitif saat ini. Sumber Daya Manusia yang berkualitas diharapkan memahami dan mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab serta mendayagunakan prasarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi kualitas hidup perempuan di Indonesia, terutama perempuan nelayan masih rendah dan tergolong miskin.

Kondisi tersebut diantaranya ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang dan pangan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) dan ketiadaan jaminan masa depan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Padahal, pemerintah melalui Kementerian, Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyiapkan program peningkatan kehidupan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar 10.640 desa di Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp127,823 miliar pada tahun 2011 dan tahun 2012

meningkat menjadi Rp1,17 triliun. Namun hingga kini kemiskinan yang terjadi pada komunitas nelayan belum teratasi. (Data Badan Pusat Statistik Tahun 2011).

Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi perikanan yang sangat melimpah baik perikanan laut maupun perikanan darat. Produksi yang dihasilkan dari perikanan laut tahun 2013 mencapai 1.476,75 ton dengan nilai 6.123, 84 juta rupiah (Sumatera dalam Angka, 2013). Nelayan di Sumatera Utara berjumlah 321.000 jiwa, yang tersebar di 13 kabupaten dan kota dari jumlah tersebut 70% adalah nelayan tradisional yang memiliki teknologi penangkapan yang rendah, 20% adalah nelayan menengah dan 10% adalah nelayan sekolah besar. (Sumatera dalam Angka, 2013) Berarti, 70% nelayan di Sumatera Utara memiliki pola aktifitas ekonomi yang berbeda dari nelayan modern lainnya. Hal inilah yang membuat sekaya apapun laut Indonesia bila tidak sejalan dengan kemampuan teknologi dari nelayan maka akan sulit untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Kawasan Barat Pulau Sumatera, dengan wilayah sebagian merupakan pulau-pulau kecil di Samudera Hindia. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2014 adalah 63.664 jiwa dari jumlah penduduk 273.168 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling tinggi dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Kecamatan Sorkam yaitu 3363 jiwa dari 26.358 penduduknya. (Tapanuli Tengah dalam angka 2014). Kemiskinan masih dialami oleh komunitas nelayan, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator seperti; masih banyak anak nelayan

yang tidak mengenyam pendidikan, masih banyak nelayan yang tidak dapat menikmati informasi dari media elektronik, rumah mereka hanya beratapkan daun rumbia, asupan makanan tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna, rumah-rumah yang sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, berlantai papan yang terlihat usang, dan keterbatasan pemilikan perabotan rumah tangga adalah tempat tinggal para nelayan buruh dan nelayan tradisional.

Demi mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikembangkan secara nasional, pemberian bantuan Bayar Langsung Tunai (BLT), dan kredit lunak. Program pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Bupati Tapanuli Tengah periode 2004-2009 dikenal dengan Program Desa Model Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera. Pelaksanaan Program ini ditetapkan beberapa kriteria yang dapat dijadikan sasaran program tersebut; yaitu (1) minimnya fasilitas pelayanan umum masyarakat, (2) masih terdapatnya keluarga miskin dan pengangguran, (3) memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dapat dikembangkan, dan (5) terisolasi, lingkungan kumuh dan tidak sehat. Usaha pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat cukup memadai, namun demikian, usaha tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Desa Binasi merupakan sebagian kecil dari wilayah pesisir di Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana Kabupaten ini hampir 40 % dari luas wilayahnya terdiri dari wilayah pesisir, yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Di lokasi ini didapatkan gambaran kehidupan ekonomi sosial masyarakat nelayan

dalam kondisi kemiskinan, dimana terlihat rumah-rumah yang sangat sederhana dan perabotan seadanya. Sebagian besar ibu rumah tangga terlihat beraktifitas dalam pekerjaan menjemur, merebus dan mengasinkan ikan, mencari kerang, merajut jaring dan berbagai pekerjaan sambilan lainnya, mereka dengan segala kesadaran penuh melakukan pekerjaan ini untuk dapat membantu menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Rata-rata pendapatan perempuan pada komunitas nelayan di desa Binasi sebesar Rp.880.000,- per bulan. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang sebagian besar rata-rata jumlah keluarganya di atas 5 orang. (Tapanuli Tengah dalam angka pada tahun 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden di desa Binasi diketahui bahwa pemberdayaan wanita nelayan di desa Binasi dalam pembangunan kelautan dan perikanan sulit dikembangkan, hal ini disebabkan karena kurangnya IPTEK dan kemiskinan yang selalu mengukung mereka. Beberapa masalah dalam integrasi wanita nelayan dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain, keadaan pendidikan yang umumnya sangat rendah, tenaga wanita sering tidak dinilai, masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai penghambat berperan sertanya wanita nelayan secara aktif, sedangkan beban kerja wanita dalam keluarga cukup tinggi. Akses perempuan nelayan untuk mencari pembiayaan di perbankan masih terbilang sulit. Salah satu penyebabnya karena pengetahuan pegawai perbankan soal perikanan sangat minim. Jika perbankan sudah memiliki pengetahuan tentang perikanan dan kelautan akan memudahkan nelayan untuk mencari modal dan mengembangkan usahanya. Adapun hal yang terpenting adalah pemerintah setempat juga belum

memperhatikan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan lokal yang ada di desa Binasi. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah yang serius, karena dalam mendukung program pemberdayaan perempuan yang melibatkan masyarakat perlu sejumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menghasilkan produk unggulan yang memiliki pangsa pasar yang baik.

Beberapa masalah dalam integrasi wanita nelayan dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain, keadaan pendidikan yang umumnya sangat rendah, tenaga wanita sering tidak dinilai, masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai penghambat berperan sertanya wanita nelayan secara aktif, sedangkan beban kerja wanita dalam keluarga cukup tinggi. Kerusakan lingkungan pesisir banyak diakibatkan oleh sedemikian pesatnya pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan prinsip kelestarian alam yang berkelanjutan. Akibat tebang habis hutan mangrove untuk dikonversi menjadi kawasan lainnya, seperti kawasan budidaya, pariwisata dan pemukiman, menyebabkan banyak kawasan yang terkikis oleh abrasi air laut. Selain itu hilangnya tempat pemijahan dan asuhan biota laut ini pun mengurangi keberadaan biota-biota tertentu seperti udang dan ikan, yang tadinya dapat ditangkap dekat pesisir, sehingga timbul kelangkaan di kawasan tersebut.

Kerusakan ini mengakibatkan nelayan harus pergi melaut untuk menangkap ikan atau hewan lainnya semakin jauh dan semakin lama. Kondisi ini menambah beban berat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dapat dikatakan bahwa kaum wanitalah yang pertama-tama akan merasakan dampak dari adanya masalah lingkungan hidup. Dalam rangka mengantisipasi keadaan tersebut di atas maka perlu diupayakan program Pemberdayaan wanita nelayan Program ini pada

hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan secara sejajar dengan kaum prianya (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001).

Salah satu cara pemberdayaan wanita ini melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di sini dapat berupa pendidikan formal melalui jalur sekolah untuk generasi muda nelayannya, selain itu melalui pendidikan non formal berupa penyuluhan atau pelatihan, juga melalui pendidikan informal berupa ceramah-ceramah di kalangan pengajian atau arisan, juga melalui percakapan-percakapan informal lainnya yang berupa informasi-informasi. Di sinilah peran wanita nelayan sangat penting di dalam menyampaikan informasi tentang pemanfaatan secara lestari sumber daya alam (SDA) kepada generasi mudanya.

Kegiatan pemberdayaan wanita nelayan melalui pendekatan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi wanita nelayan, ternyata dapat menghasilkan berbagai produk unggulan dari potensi kelautan dan dengan pendampingan manajemen dan kewirausahaan serta teknologi tepat guna yang mengarah pada peningkatan mutu atau kualitas produk, tentu hal ini akan semakin meningkatkan peran wanita nelayan tersebut untuk perekonomian keluarga.

Contoh lain adalah wanita nelayan Indonesia dapat dilibatkan dalam usaha pembudidayaan ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh wanita nelayan di India dan Bangladesh. Semuanya ini dapat dilakukan melalui pendidikan non formal berupa penyuluhan-penyuluhan baik kepada nelayan dan wanita nelayan. Penyuluhan kepada wanita nelayan pun harus langsung ditujukan kepada wanita itu sendiri, bukan dengan mewakilkannya kepada kaum prianya.

Rendahnya pendidikan formal yang dimiliki oleh wanita nelayan akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyerap informasi yang sering kali disampaikan dengan metode penyampaian yang tidak tepat disamping materi yang terlalu tinggi untuk kemampuan mereka, kadangkala mereka masih banyak yang buta huruf. Pengembangan teknik inilah membutuhkan kerjasama dari para ahli beberapa disiplin ilmu.

Pada tataran masyarakat level bawah, kaum perempuan merupakan tulang punggung utama dalam keberlangsungan hidup keluarga, sehingga dari segi waktu, mereka sama sekali tidak memiliki akses untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan pemberian kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pertemuan dalam rangka program-program pembangunan pada wadah pertemuan yang dikhususkan untuk mereka, akan membantu kaum perempuan untuk merubah cara pandangnya tentang hidup. Yakni, bahwa mereka memiliki hak dan memiliki andil yang cukup besar dalam pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya, sehingga lambat laun akan menimbulkan satu kepercayaan diri dari mereka untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di berbagai sektor.

Dalam usaha pelestarian alam wilayah pesisir dan laut, sudah seharusnya dilibatkan dan diberdayakan peran wanita nelayan dengan harapan mereka dapat merubah sikap terhadap konservasi alam dan mewujudkannya dalam aksi. Melalui pendidikan informal yang dilakukan wanita nelayan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya, diharapkan di kemudian hari akan terbentuk generasi muda yang berwawasan lingkungan dengan melakukan pemanfaatan SDA secara lestari. Pendidikan lingkungan tersebut sebaiknya menggunakan landasan keilmuan,

teknologi, agama dan kesenian agar lebih menarik perhatian audiens dan membentuk sikap baru yang positif

Program pemberdayaan perempuan di desa Binasi telah banyak dilakukan. Adapun salah satu implementasi program pemberdayaan perempuan dalam studi keluarga nelayan di desa Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu tentang teknologi tepat guna terpadu pengolahan ikan yang menjadi basis dalam pengembangan usaha perempuan nelayan miskin. Pemberdayaan perempuan nelayan di desa Binasi dilakukan dengan pendidikan tentang kewirausahaan, praktek teknologi pengolahan ikan, yakni kerupuk, bakso, dan nugget, yang dilanjutkan dengan pendampingan; pengemasan produk dan pemberian peralatan produksi sampai mendapatkan ijin produksi. Kelompok nelayan yang dapat mengembangkan kegiatan ini sebanyak dua kelompok dengan memproduksi krupuk ikan, dan dalam proses mendapat ijin produksi. Setiap produksi krupuk dilakukan, semua krupuk yang telah dikemas terjual habis di sekitar masyarakat nelayan. Produk bakso dan nugget diolah untuk lauk pauk keluarga sendiri, sehingga dapat membantu meningkatkan asupan gizi. Apabila krupuk diproduksi secara rutin setiap hari dengan bahan baku ikan 1,5 kg dapat diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.750.000/bulan,-

Dengan demikian kegiatan tersebut harus juga mempunyai orientasi kepada peningkatan nilai tambah produk nelayan. Sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan nelayan maka perlu ditempuh berbagai upaya sebagaimana dikemukakan Zein (2006):

- 1) Pembentukan Kelompok. Guna meningkatkan usaha wanita nelayan dipedesaan pantai perlu adanya kelompok yang kokoh, melalui pembinaan dan penguatan kelompok.
- 2) Perencanaan Program. Kelompok yang kokoh, diarahkan menyusun program yang sesuai dengan kemampuan SDM dan keberadaan Sumberdaya Alam lokal. Program haruslah yang rasional dan dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok.
- 3) Pelaksanaan Program. Dengan program yang baik, maka seluruh anggota kelompok pun harus mampu melaksanakan seluruh program dengan konsisten. Pelaksanaan program harus berorientasi pada; Jenis kegiatan, proses produksi, kontrol mutu, dan akses terhadap pasar.

Agar usaha perempuan nelayan dapat berjalan dengan sukses, maka peranan tenaga pendamping adalah sangat penting artinya. Sehingga rekrutmen tenaga pendamping yang menggunakan keterampilan teknis yang tinggi, dengan bantuan pemerintah sangatlah mendukung.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberdayaan perempuan pada komunitas nelayan di desa Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Pemberdayaan wanita nelayan sulit dikembangkan, hal ini disebabkan karena kurangnya IPTEK.

2. Beban kerja wanita dalam keluarga cukup tinggi sehingga tidak aktif mengikuti program pemberdayaan perempuan.
3. Modal usaha sangat sulit didapatkan karena harus adanya jaminan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.
4. Pemerintah dan organisasi sosial kurang serius dalam pemberdayaan perempuan nelayan, sesuai dengan minat, potensi, dan faktor alam yang ada.

C. Batasan Masalah

Dari sekian banyak masalah yang dikemukakan, maka masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada “Pemberdayaan perempuan pada komunitas sosial nelayan binasi di desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah”.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang pokok dalam suatu penelitian. Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis uraikan ke dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kondisi kaum perempuan pada komunitas nelayan sebelum dilakukan program pemberdayaan di desa Binasi?
2. Seberapa baik program pemberdayaan yang dilakukan pada kaum perempuan di desa Binasi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kaum perempuan pada komunitas nelayan sebelum dilakukan program pemberdayaan di desa Binasi?
2. Seberapa baik program pemberdayaan yang dilakukan pada kaum perempuan di desa Binasi?

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak, diantaranya :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi kaum perempuan komunitas sosial nelayan binasi, sebagai pertimbangan akan pentingnya peran ganda dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
- b. Bagi pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan pendidikan dalam upaya meningkatkan kehidupan yang lebih baik dikalangan masyarakat nelayan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumber referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi fakultas ilmu pendidikan khususnya jurusan pendidikan luar sekolah.



THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY